

## **Penerapan Metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) dalam Mengoptimalkan Alokasi Dana Desa di Desa Catur Karya Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong**

**Herawati\*, Ahmad Yunani**

*Program Studi Ekonomi Pembangunan,  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat  
[\\*herawatiherawati2611@gmail.com](mailto:*herawatiherawati2611@gmail.com)*

### **Abstract**

*This research is motivated by the importance of optimizing Village Fund allocations as a fiscal instrument to foster local economic independence and community welfare in Catur Karya Village, Tabalong Regency. The primary focus of this study is to determine the priority scale of Village Fund utilization to address the challenges of budget constraints amidst the highly dynamic needs of village development. The methodology applied is a qualitative descriptive approach using the Analytical Hierarchy Process (AHP) instrument. The analysis results show that three main criteria serve as the basis for consideration: alignment with the Village Mid-Term Development Plan (RPJMDesa), village potential strengths, and urgent problems. Based on the weight calculations, the priority order for village expenditure allocation was found as follows: community empowerment sector (43%), village development (29%), community guidance (17%), and village government administration (11%). The study concludes that community empowerment is the most dominant component that must be prioritized to create inclusive economic growth.*

**Keywords:** Village Expenditure; Priority; AHP Method.

### **Abstrak**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya optimalisasi alokasi Dana Desa sebagai instrumen fiskal untuk mendorong kemandirian ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat di Desa Catur Karya, Kabupaten Tabalong. Fokus utama penelitian ini adalah menentukan skala prioritas penggunaan Dana Desa guna mengatasi tantangan keterbatasan anggaran di tengah tingginya dinamika kebutuhan pembangunan desa. Metodologi yang diterapkan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan instrumen *Analytical Hierarchy Process* (AHP). Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, serta penyebaran kuesioner kepada 10 responden ahli yang terdiri dari perangkat desa dan tokoh masyarakat berpengaruh. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat tiga kriteria utama yang menjadi dasar pertimbangan, yaitu kesesuaian dengan RPJMDesa, potensi keunggulan desa, dan permasalahan mendesak. Berdasarkan perhitungan bobot, ditemukan urutan prioritas alokasi belanja desa: sektor pemberdayaan masyarakat (43%), pembangunan desa (29%), pembinaan kemasyarakatan (17%), dan penyelenggaraan pemerintah desa (11%). Penelitian menyimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan komponen paling dominan yang harus diprioritaskan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

**Kata Kunci:** Dana Desa; Prioritas; Metode AHP.

### **PENDAHULUAN**

Pembangunan perdesaan merupakan pilar fundamental dalam agenda Nawacita yang berupaya memperkuat Indonesia dari pinggiran. Dalam konteks ekonomi pembangunan, keberhasilan transformasi desa tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang diserap, tetapi dari sejauh mana alokasi tersebut mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan mereduksi

kesenjangan (Tri Kartono & Nurcholis, 2019). Sebagai instrumen fiskal utama, Dana Desa dirancang untuk menjadi stimulus bagi kemandirian ekonomi lokal melalui penyediaan infrastruktur dasar dan pengembangan sektor unggulan.

Namun, efektivitas Dana Desa sering kali terbentur pada dilema alokasi yang tidak tepat sasaran. Di Desa Catur Karya, Kecamatan Haruai, tantangan ini menjadi kian mendesak jika meninjau dinamika penerimaan dana dalam lima tahun terakhir. Data menunjukkan adanya tren penurunan alokasi yang konsisten sejak tahun 2020 hingga 2023.

**Tabel 1**  
**Jumlah Penerimaan Dana Desa Catur Karya**

| Tahun | Dana Desa (Rp) | Perubahan (%) |
|-------|----------------|---------------|
| 2019  | 779.123.000    | -             |
| 2020  | 790.659.000    | +1.48%        |
| 2021  | 679.320.000    | -14.08%       |
| 2022  | 686.113.000    | +1.00%        |
| 2023  | 673.081.000    | -1.90%        |

Sumber: Kantor Desa Catur Kary, Diolah kembali, 2024

Fenomena penurunan alokasi fiskal ini menciptakan *research gap* yang krusial bagi sebuah desa berkategori "kecil" dengan luas wilayah 5,54 km<sup>2</sup> dan populasi 710 jiwa. Dalam perspektif ekonomi, kondisi ini memicu masalah kelangkaan (*scarcity*), di mana pemerintah desa dipaksa untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang kompleks dan target SDGs Desa dengan sumber daya yang kian terbatas. Penurunan dana dari angka Rp790 juta (2020) menjadi Rp673 juta (2023) menuntut adanya mekanisme pengambilan keputusan yang jauh lebih ketat. Tanpa prioritas yang objektif, pemotongan anggaran ini berisiko menyebabkan proyek pembangunan menjadi mangkrak atau tidak memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan warga.

Selama ini, penetapan prioritas pembangunan di tingkat desa sering kali bertumpu pada mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang cenderung bersifat kualitatif dan rentan terhadap dominasi elit atau kepentingan sektoral. Dalam situasi anggaran yang menyusut, metode konvensional tersebut dianggap kurang mampu memberikan solusi alokasi yang optimal dan transparan. Oleh karena itu, diperlukan sebuah alat pendukung keputusan (*Decision Support System*) yang mampu mengonversi penilaian kualitatif menjadi data kuantitatif yang terukur.

Penelitian ini menggunakan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) untuk mengatasi kompleksitas tersebut. Pemilihan AHP didasarkan pada kemampuannya untuk mengurai struktur masalah ke dalam hirarki prioritas yang logis melalui matriks perbandingan berpasangan. Dengan mengintegrasikan kriteria-kriteria seperti urgensi kebutuhan masyarakat, potensi ekonomi lokal, dan kesesuaian dengan RPJMDes, AHP dapat menghasilkan urutan prioritas pembangunan yang lebih presisi. Melalui pendekatan ini, diharapkan penggunaan Dana Desa Catur Karya tidak lagi didasarkan pada intuisi birokrat semata, melainkan pada analisis multikriteria yang mampu menjaga momentum pembangunan di tengah keterbatasan fiskal.

## KAJIAN PUSTAKA

Penelitian mengenai alokasi dan efektivitas Dana Desa telah banyak dilakukan dengan berbagai pendekatan metodologi. Untuk memberikan gambaran yang komprehensif, literatur terdahulu dikelompokkan berdasarkan fokus analisis dan instrumen metodologi yang digunakan, sebagaimana dirangkum dalam peta penelitian berikut.

Beberapa studi awal berfokus pada evaluasi administratif dan dampak makro penggunaan dana. Mulyadi (2022) mengevaluasi tata kelola di Desa Labuhan Bilik dengan analisis persentase, menemukan bahwa fokus utama masih pada pembangunan infrastruktur

jalan. Sejalan dengan itu, Putra & Saleh (2019) menilai efektivitas penggunaan dana di Desa Sungai Batang dengan rasio efektivitas pendapatan yang mencapai rata-rata 148%.

Sementara itu, Reskia (2023) menggunakan regresi data panel untuk membuktikan bahwa pembangunan infrastruktur secara signifikan meningkatkan Indeks Desa Membangun (IDM), meski terdapat catatan mengenai ketidakseimbangan indeks komposit. Kelompok penelitian ini cenderung bersifat normatif-evaluatif terhadap data sekunder.

Penggunaan *Analytical Hierarchy Process* (AHP) mulai diadopsi untuk meminimalkan subjektivitas dalam pengambilan keputusan di desa. Syafruddin (2020) dan Ridha (2019) memulai pemetaan prioritas di Kabupaten Banjar dan Indragiri Hilir, di mana keduanya menemukan bahwa kriteria kebutuhan mendesak dan ketersediaan anggaran menjadi determinan utama. Dalam konteks desa wisata, Fitri & Wardhana (2025) menggunakan AHP untuk memprioritaskan belanja di Desa Pulantani, yang menekankan pada kriteria potensi daya tarik wisata sebagai pendorong ekonomi.

Penelitian lain oleh Jepriansyah (2023) dan Sari (2023) menunjukkan hasil yang konsisten bahwa sektor pembangunan fisik masih mendominasi prioritas (berkisar antara 36% hingga 42%), mengungguli sektor pemberdayaan masyarakat. Dukungan teknis terhadap metode ini diperkuat oleh Fadila dkk. (2025) yang menegaskan bahwa AHP merupakan Sistem Pendukung Keputusan (SPK) yang paling relevan untuk transparansi alokasi dana desa karena mampu mengonversi kualitatif menjadi kuantitatif.

Berdasarkan pemetaan literatur di atas, terdapat beberapa celah penelitian (*research gap*) yang menjadi titik tekan dalam studi ini. Tabel berikut merangkum perbedaan kriteria penelitian terdahulu dengan penelitian di Desa Catur Karya:

**Tabel 2**  
**Sintesis dan Novelty (Kebaruan Penelitian)**

| Peneliti       | Metode     | Kriteria Utama yang Digunakan                                      | Fokus Utama           |
|----------------|------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Mulyadi (2022) | Deskriptif | Kepatuhan regulasi, Partisipasi                                    | Tata Kelola           |
| Sari (2023)    | AHP        | RPJMD, Potensi Desa, Isu Desa                                      | Belanja Desa Umum     |
| Fitri (2025)   | AHP        | Potensi Wisata, Infrastruktur                                      | Desa Wisata           |
| Penelitian Ini | AHP        | Urgentitas Fiskal, Degradasi Anggaran, SDGs Desa, Kelayakan Teknis | Optimasi saat Defisit |

Sumber: Diolah, 2025

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada pengujian model *Analytical Hierarchy Process* (AHP) dalam kondisi degradasi fiskal yang ekstrem, sebuah konteks yang jarang disentuh oleh studi terdahulu seperti Jepriansyah (2023) atau Sari (2023) yang umumnya mengasumsikan kondisi anggaran dalam keadaan stabil. Di tengah tren penurunan Dana Desa Catur Karya yang terjadi secara konsisten selama periode 2020–2023, penelitian ini menyintesis kriteria pengambilan keputusan yang lebih spesifik dan adaptif. Jika penelitian sebelumnya cenderung hanya menggunakan kriteria standar seperti "Potensi Desa", studi ini mengintegrasikan kriteria Resiliensi Ekonomi yakni kemampuan program pembangunan untuk tetap fungsional dan berkelanjutan di tengah pemotongan anggaran serta kriteria Sinkronisasi SDGs Desa untuk memastikan bahwa prioritas pembangunan tetap selaras dengan target global meskipun kapasitas fiskal menyusut.

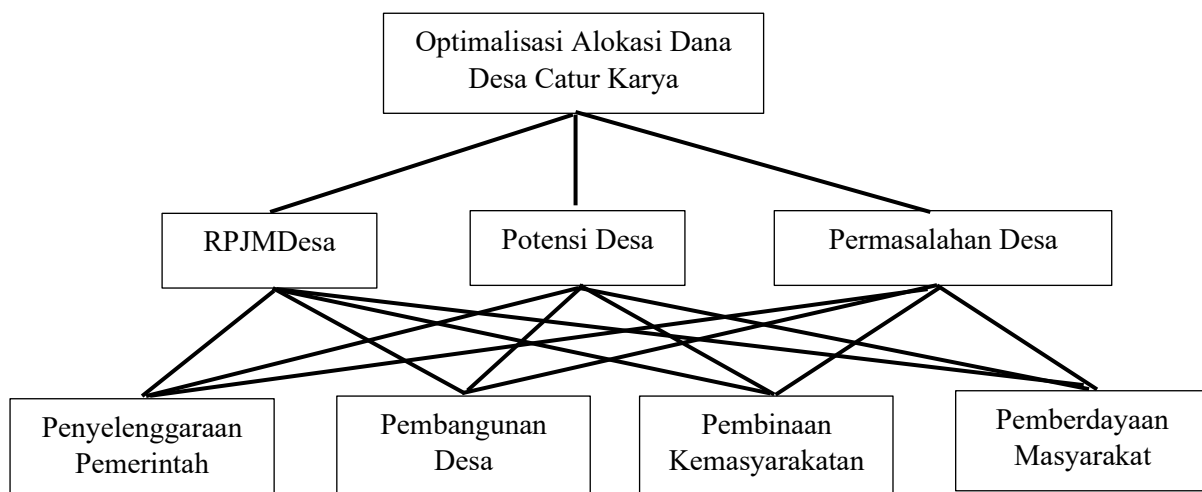
Secara praktis, kontribusi penelitian ini diharapkan mampu menjadi panduan strategis bagi birokrat dan perangkat desa, khususnya pada desa-desa berkategori kecil, dalam melakukan efisiensi anggaran (*budget cutting*) secara cerdas. Dengan memetakan program yang memiliki dampak pengganda (*multiplier effect*) tertinggi melalui pendekatan AHP, penelitian ini menawarkan solusi agar kualitas hidup masyarakat dan pertumbuhan ekonomi desa tetap terjaga tanpa harus mengorbankan target pembangunan jangka panjang akibat keterbatasan dana. Melalui pendekatan ini, pengambilan keputusan tidak lagi bersifat intuitif,

melainkan berbasis data yang mampu mempertanggungjawabkan setiap rupiah yang dialokasikan di tengah keterbatasan fiskal.

## METODE

Penelitian ini dirancang menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mengurai kompleksitas dalam penentuan prioritas penggunaan Dana Desa di Desa Catur Karya, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong. Instrumen utama yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan ini adalah metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) yang dikembangkan oleh Profesor Thomas Lorie Saaty. Pemilihan metode AHP didasarkan pada kemampuannya untuk menyederhanakan masalah yang kompleks dengan menggabungkan elemen logika dan perasaan, sehingga membantu penyusunan hierarki kriteria yang terstruktur untuk menghasilkan bobot prioritas yang objektif.

Langkah awal dalam metodologi ini adalah pengumpulan data primer melalui wawancara mendalam dan penyebaran kuesioner kepada 10 responden terpilih yang dianggap memiliki pengaruh signifikan dalam penentuan kebijakan dana desa di Desa Catur Karya. Responden diminta untuk memberikan penilaian melalui matriks perbandingan berpasangan terhadap tiga kriteria utama, yaitu kesesuaian dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa), potensi desa yang tersedia, serta permasalahan mendesak yang dihadapi oleh masyarakat desa. Data kualitatif dari persepsi responden tersebut kemudian dikonversi menjadi data kuantitatif melalui penghitungan rata-rata geometrik untuk menentukan tingkat kepentingan relatif antar kriteria (Wijono & Ekonomi, 2015).



**Gambar 1 Struktur Hierarki Optimalisasi Alokasi Dana Desa Catur Karya**

Sumber: Hasil Pemikiran Penulis (2025)

Dalam proses analisisnya, AHP membagi situasi kondisi ke dalam beberapa komponen berbeda untuk menentukan peringkat atau urutan prioritas dari berbagai alternatif program. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang diisi oleh 10 responden ahli (perangkat desa dan tokoh masyarakat). Penilaian dilakukan menggunakan Skala Perbandingan Berpasangan Saaty (1-9). Skala ini memungkinkan responden mengekspresikan derajat kepentingan satu elemen terhadap elemen lainnya, di mana angka 1 menunjukkan "sama penting" dan angka 9 menunjukkan "mutlak lebih penting".

**Tabel 3**  
**Skala Perbandingan Berpasangan**

| Intensitas Kepentingan          | Definisi                                                   | Keterangan                                                                                                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                               | Sama penting ( <i>Equally Important</i> )                  | Kedua kriteria memberikan kontribusi yang sama terhadap tujuan.                                                 |
| 3                               | Sedikit lebih penting ( <i>Moderately More Important</i> ) | Pengalaman dan penilaian sedikit memihak satu kriteria dibandingkan yang lain.                                  |
| 5                               | Lebih penting ( <i>Strongly More Important</i> )           | Satu kriteria sangat disukai dan secara praktis dominansinya sangat nyata.                                      |
| 7                               | Sangat penting ( <i>Very Strongly More Important</i> )     | Satu kriteria terbukti sangat dominan dan keunggulannya sudah terlihat jelas.                                   |
| 9                               | Mutlak lebih penting ( <i>Extremely More Important</i> )   | Bukti yang memihak satu kriteria terhadap kriteria lain memiliki tingkat penegasan tertinggi.                   |
| 2, 4, 6, 8                      | Nilai-nilai tengah                                         | Digunakan apabila ada keraguan di antara dua penilaian yang berdekatan.                                         |
| Kebalikan ( <i>Reciprocal</i> ) | Nilai Kebalikan                                            | Jika kriteria A dibanding kriteria B memiliki nilai 3, maka kriteria B dibanding kriteria A memiliki nilai 1/3. |

Sumber: Diolah, 2026

Setelah data terkumpul, langkah-langkah pengolahan data dilakukan sebagai berikut:

#### Penghitungan Rata-rata Geometrik (*Geometric mean*)

Karena melibatkan 10 responden, penilaian gabungan dicari menggunakan rumus rata-rata geometrik agar hasil perbandingan bersifat representatif:

$$G = \sqrt[n]{x_1 \times x_2 \times \dots \times x_n} \dots \dots \dots (1)$$

dengan

n : jumlah responden

x : nilai penilaian

#### Matriks Perbandingan Berpasangan dan Bobot Prioritas

Data kemudian disusun ke dalam matriks persegi. Nilai bobot prioritas kriteria diperoleh dengan menormalisasi kolom dan menghitung rata-rata baris pada matriks tersebut untuk mendapatkan *eigenvector*.

#### Uji Konsistensi Logika

Untuk memastikan penilaian responden tidak bersifat acak atau bias, dilakukan uji konsistensi. Tahapan ini dimulai dengan menghitung *Consistency Index* (CI) menggunakan rumus:

$$CI = \frac{\lambda_{max} - n}{n - 1} \dots \dots \dots (2)$$

dengan  $\lambda_{max}$  adalah nilai eigen terbesar dan n adalah jumlah kriteria.

Selanjutnya, dihitung *Consistency Ratio* (CR) dengan membagi CI dengan *Random Index* (RI) yang sesuai:

$$CR = \frac{CI}{RI} \dots \dots \dots (3)$$

Hasil perhitungan dinyatakan valid dan konsisten jika nilai **CR ≤ 0,1 (10%)**. Jika nilai CR lebih besar dari 0,1, maka pengambilan data melalui kuesioner harus diulang karena dianggap tidak konsisten.

#### Penentuan Prioritas Akhir

Langkah terakhir dalam metodologi ini adalah sintesis prioritas. Bobot dari setiap kriteria (RPJMDesa, Potensi Desa, Permasalahan Desa) dikalikan dengan bobot masing-masing

alternatif program. Hasil perkalian ini memberikan urutan prioritas final yang menunjukkan program mana yang paling mendesak untuk didanai oleh Dana Desa berdasarkan kondisi objektif di Desa Catur Karya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian yang penulis teliti ialah tentang Analisis Prioritas Penggunaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa Catur Karya Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong. yang dilihat dari beberapa masalah dan potensi yang dimiliki di Desa Catur Karya. Di antara data primer yang dikumpulkan oleh penulis adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara, kuesioner, dan pendapatan dari responden atau individu yang terkait dengan model dan masalah yang diteliti. *Analitik Hierarki Process* (AHP) adalah model yang digunakan oleh penelti untuk membagi situasi kondisi menjadi beberapa komponen yang berbeda dan kemudian membaginya menjadi bagian-bagian yang berbeda.

**Tabel 4**  
**Hitungan Rata-Rata Geometrik Kriteria**

| Responden  | RPJMDesa  | Potensi Desa | Permasalahan |
|------------|-----------|--------------|--------------|
| 1          | 7         | 8            | 7            |
| 2          | 8         | 8            | 6            |
| 3          | 8         | 9            | 3            |
| 4          | 6         | 7            | 5            |
| 5          | 7         | 8            | 7            |
| 6          | 7         | 8            | 4            |
| 7          | 8         | 9            | 6            |
| 8          | 7         | 7            | 5            |
| 9          | 9         | 7            | 7            |
| 10         | 7         | 8            | 8            |
| Jumlah     | 464679936 | 910393344    | 29635200     |
| Rata-rata  | 7,36      | 7,87         | 5,59         |
| Pembulatan | 7         | 8            | 6            |

Sumber: Diolah, 2026

Berdasarkan tabel 4, berikut penghitungan dengan menggunakan perhitungan geometri

$$G_{RPJMDes} = \sqrt[10]{7 \times 8 \times 8 \times 6 \times 7 \times 7 \times 8 \times 7 \times 9 \times 7} = 7,36$$

$$G_{Potensi\ desa} = \sqrt[10]{8 \times 8 \times 9 \times 7 \times 8 \times 8 \times 9 \times 7 \times 7 \times 8} = 7,87$$

$$G_{RPJMDes} = \sqrt[10]{7 \times 6 \times 3 \times 5 \times 7 \times 4 \times 6 \times 5 \times 7 \times 8} = 5,59$$

Rata-rata geometrik tertinggi adalah untuk potensi desa, dengan nilai sebesar 7,87 yang dibulatkan menjadi 8. Rata-rata geometrik untuk RPJMDesa adalah 7,36 yang dibulatkan menjadi 7, sedangkan untuk permasalahan desa adalah 5,59 yang dibulatkan menjadi 6. Dari 10 responden, rata-rata nilai tertinggi untuk alternatif adalah potensi desa.

**Tabel 5**  
**Matriks Bobot Untuk Kriteria**

| Kriteria     | RPJMDes | Potensi Desa | Permasalahan | Jumlah | Prioritas Rata-Rata |
|--------------|---------|--------------|--------------|--------|---------------------|
| RPJMDes      | 0,286   | 0,333        | 0,273        | 0,892  | 0,297               |
| Potensi      | 0,143   | 0,167        | 0,182        | 0,491  | 0,164               |
| Permasalahan | 0,571   | 0,500        | 0,545        | 1,617  | 0,539               |

Sumber: Diolah, 2026

Bobot rata-rata diperoleh dari nilai rata bobot untuk setiap kriteria. Dibandingkan dengan permasalahan desa dan RPJMDes, persentase prioritas atau preferensi untuk kriteria alternatif adalah sebagai berikut: RPJMDes sebesar 0,297 atau 30%, potensi desa sebesar 0,539 atau 54%, dan permasalahan desa sebesar 0,164 atau 16%.

Tabel 6

Matriks Rasio Konsistensi Kriteria

| Kriteria     | RPJMDes | Potensi Desa | Permasalahan |
|--------------|---------|--------------|--------------|
| RPJMDes      | 1       | 2            | 0.5          |
| Potensi Desa | 0.5     | 1            | 0,33         |
| Permasalahan | 2       | 3            | 1            |
| Jumlah       | 3.5     | 6.00         | 1.8          |



| Kriteria     | RPJMDes | Potensi desa | Permasalahan | Jumlah Baris |
|--------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| RPJMDes      | 0,29726 | 0,32756      | 0,26948      | 0,89430      |
| Potensi Desa | 0,14863 | 0,16378      | 0,17965      | 0,49206      |
| Permasalahan | 0,59452 | 0,49134      | 0,53896      | 1,62482      |

Sumber: Diolah, 2026

$$\begin{bmatrix} 0,297 \\ 0,163 \\ 0,538 \end{bmatrix} \div \begin{bmatrix} 0,894 \\ 0,492 \\ 1,624 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3,01 \\ 3,00 \\ 3,01 \end{bmatrix}$$

**Mencari Nilai Eigen  $\lambda_{maks}$  Dan Nilai Consistency Indeks (CI)**

$$\lambda_{maks} = \frac{3.01 + 3.00 + 3.01}{3} = 3,01$$

$$CI = \frac{\lambda_{maks} - n}{n - 1} = \frac{3.01 - 3}{3 - 1} = \frac{0.01}{2} = 0,05$$

**Perhitungan Nilai Consistency Rasio (CR) Berdasarkan Nilai Random Index (RI)**

$$CR = \frac{CI}{RI} = \frac{0,05}{0,58} = 0,09$$

Menurut Profesor Saaty, nilai rasio konsistensi yang diterima adalah sama dengan atau kurang dari 10%, atau kurang dari 0,1, yang berarti penelitian tersebut dapat diterima. Hasil perhitungan rasio konsistensi menunjukkan nilai 0,09 atau 0,9, yang menunjukkan bahwa jawaban responden pada kuesioner penelitian tersebut konsisten.

Tabel 7  
RPJMDES

| Kriteria<br>RPJMDES                | Penyelenggaraan<br>Pemerintah Desa | Pembangunan<br>Desa | Pemberdayaan<br>Masyarakat | Pembinaan<br>Masyarakat |
|------------------------------------|------------------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------|
| Penyelenggaraan<br>Pemerintah Desa | 1                                  | 0,5                 | 0,33                       | 0,5                     |
| Pembangunan Desa                   | 2                                  | 1                   | 0,25                       | 3                       |
| Pembinaan<br>Masyarakat            | 3                                  | 4                   | 1                          | 2                       |
| Pemberdayaan<br>Masyarakat         | 2                                  | 0,33                | 0,5                        | 1                       |
| <b>Jumlah</b>                      | <b>8</b>                           | <b>5,83</b>         | <b>2,08</b>                | <b>6,5</b>              |



| Kriteria RPJMDES                | Penyelenggaraan Pemerintah Desa | Pembangunan Desa | Pemberdayaan Masyarakat | Pembinaan Masyarakat | Jumlah Baris | Rata2 (Vektor Prioritas) |
|---------------------------------|---------------------------------|------------------|-------------------------|----------------------|--------------|--------------------------|
| Penyelenggaraan Pemerintah Desa | 0,125                           | 0,0857           | 0,16                    | 0,0769               | 0,447637363  | 0,11                     |
| Pembangunan Desa                | 0,25                            | 0,1714           | 0,12                    | 0,4615               | 1,002967033  | 0,25                     |
| Pembinaan Masyarakat            | 0,375                           | 0,6857           | 0,48                    | 0,3077               | 1,848406593  | 0,46                     |
| Pemberdayaan Masyarakat         | 0,25                            | 0,0571           | 0,24                    | 0,1538               | 0,700989011  | 0,18                     |
| <b>Jumlah</b>                   | <b>1</b>                        | <b>1</b>         | <b>1</b>                | <b>1</b>             |              | <b>1,000</b>             |

Sumber: Diolah, 2026

Rata-rata geometrik untuk alternatif kriteria RPJMDes pada tabel 7 diatas, menunjukkan nilai vektor prioritas (bobot) untuk masing-masing alternatif kriteria. Urutan prioritas untuk alternatif adalah pemberdayaan masyarakat dengan nilai 0,46, pembangunan desa dengan nilai 0,25, pembinaan masyarakat dengan nilai 0,18, dan penyelenggaraan pemerintah desa dengan nilai 0,11.

**Tabel 8**  
**Potensi Desa**

| Kriteria Potensi Desa           | Penyelenggaraan Pemerintah Desa | Pembangunan Desa | Pemberdayaan Masyarakat | Pembinaan Masyarakat |
|---------------------------------|---------------------------------|------------------|-------------------------|----------------------|
| Penyelenggaraan Pemerintah Desa | 1                               | 0,25             | 0,5                     | 0,5                  |
| Pembangunan Desa                | 4                               | 1                | 0,25                    | 4                    |
| Pemberdayaan Masyarakat         | 2                               | 3                | 1                       | 3                    |
| Pembinaan Masyarakat            | 2                               | 0,5              | 0,333333333             | 1                    |
| <b>Jumlah</b>                   | <b>9</b>                        | <b>4,75</b>      | <b>2,083333333</b>      | <b>8,5</b>           |



| Kriteria Potensi Desa           | Penyelenggaraan Pemerintah Desa | Pembangunan Desa | Pemberdayaan Masyarakat | Pembinaan Masyarakat | Jumlah Baris | Rata2 (Vektor Prioritas) |
|---------------------------------|---------------------------------|------------------|-------------------------|----------------------|--------------|--------------------------|
| Penyelenggaraan Pemerintah Desa | 0,111111111                     | 0,052631579      | 0,24                    | 0,058823529          | 0,462566219  | 0,12                     |
| Pembangunan Desa                | 0,444444444                     | 0,210526316      | 0,12                    | 0,470588235          | 1,245558996  | 0,31                     |
| Pemberdayaan Masyarakat         | 0,222222222                     | 0,631578947      | 0,48                    | 0,352941176          | 1,686742346  | 0,42                     |
| Pembinaan Masyarakat            | 0,222222222                     | 0,105263158      | 0,16                    | 0,117647059          | 0,605132439  | 0,15                     |
| <b>Jumlah</b>                   | <b>1</b>                        | <b>1</b>         | <b>1</b>                | <b>1</b>             |              | <b>1,00</b>              |

Sumber: Diolah, 2026

Nilai rata-rata geometrik alternatif kriteria bidang potensi desa yang ditampilkan pada tabel di atas. Bisa dilihat bahwa nilai rata-rata bobot vector prioritas (bobot) untuk masing-masing kriteria bidang potensi desa adalah 0,31, untuk pembangunan desa 0,42, untuk pemberdayaan masyarakat 0,15, dan untuk penyelenggaraan pemerintah desa 0,12.

**Tabel 9**  
**Permasalahan Desa**

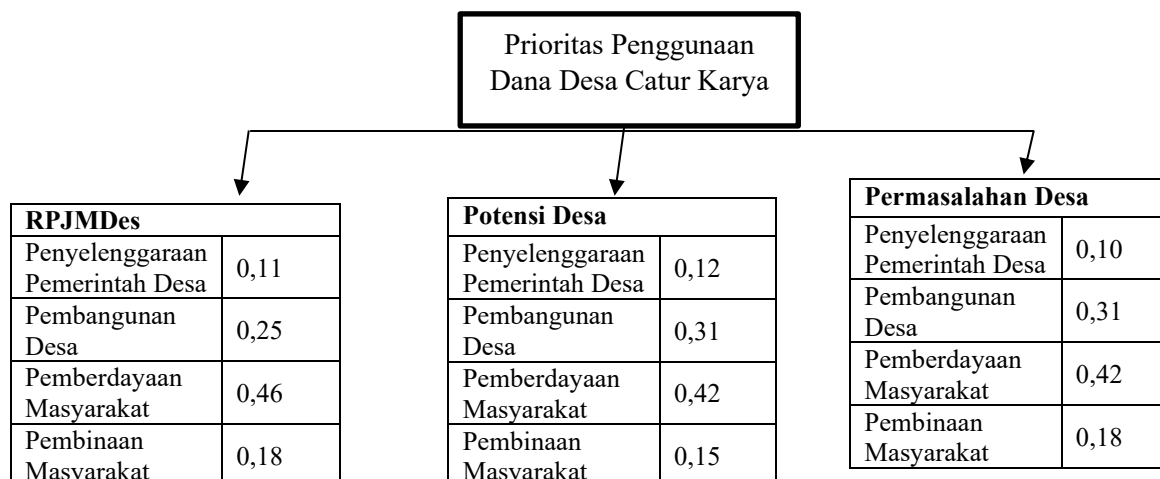
| Kriteria Masalah Desa           | Penyelenggaraan Pemerintah Desa | Pembangunan Desa | Pemberdayaan Masyarakat | Pembinaan Masyarakat |
|---------------------------------|---------------------------------|------------------|-------------------------|----------------------|
| Penyelenggaraan Pemerintah Desa | 1                               | 0,2              | 0,5                     | 0,33                 |
| Pembangunan Desa                | 5                               | 1                | 0,25                    | 3                    |
| Pemberdayaan Masyarakat         | 2                               | 4                | 1                       | 2                    |
| Pembinaan Masyarakat            | 3                               | 0,33             | 0,5                     | 1                    |
| <b>Jumlah</b>                   | <b>11</b>                       | <b>5,53</b>      | <b>2,25</b>             | <b>6,33</b>          |



| Kriteria Masalah Desa           | Penyelenggaraan Pemerintah Desa | Pembangunan Desa | Pembinaan Masyarakat | Pemberdayaan Masyarakat | Jumlah Baris | Rata2 (Vektor Prioritas) |
|---------------------------------|---------------------------------|------------------|----------------------|-------------------------|--------------|--------------------------|
| Penyelenggaraan Pemerintah Desa | 0,090909091                     | 0,036144578      | 0,222222222          | 0,052631579             | 0,40190747   | 0,10                     |
| Pembangunan Desa                | 0,454545455                     | 0,180722892      | 0,111111111          | 0,473684211             | 1,220063668  | 0,31                     |
| Pembinaan Masyarakat            | 0,181818182                     | 0,722891566      | 0,444444444          | 0,315789474             | 1,664943666  | 0,42                     |
| Pemberdayaan Masyarakat         | 0,272727273                     | 0,060240964      | 0,222222222          | 0,157894737             | 0,713085196  | 0,18                     |
| <b>Jumlah</b>                   | <b>1</b>                        | <b>1</b>         | <b>1</b>             | <b>1</b>                |              | <b>1,00</b>              |

Sumber: Diolah, 2026

Rata-rata geometrik dari bobot alternatif kriteria bidang permasalahan desa yang tercantum dalam Tabel 5.6 sebelumnya adalah sebagai berikut: pembangunan desa 0,31, pembinaan masyarakat 0,18, pemberdayaan masyarakat 0,42, dan penyelenggaraan pemerintah desa 0,10.



**Gambar 2. Prioritas Belanja Desa Pada Dana Desa**

Sumber: Diolah, 2026

**Tabel 10**  
**Alternatif Dengan Bobot Kriteria Yang Bersangkutan**

| Kriteria                        | RPJMDes | Potensi Desa | Permasalahan |   |          |      |
|---------------------------------|---------|--------------|--------------|---|----------|------|
| Penyelenggaraan Pemerintah Desa | 0,11    | 0,12         | 0,10         | X | 0,30     | 0,11 |
| Pembangunan Desa                | 0,25    | 0,31         | 0,31         |   | 0,54     | 0,29 |
| Pemberdayaan Masyarakat         | 0,46    | 0,42         | 0,42         |   | 0,16     | 0,43 |
| Pembinaan Masyarakat            | 0,18    | 0,15         | 0,18         |   | Bobot    | 0,17 |
| Matriks Prioritas               |         |              |              |   | Kriteria | 1,00 |

*\*Hasil Perhitungan dari Perkalian Setiap Bobot*

Keputusan prioritas yang diambil adalah sebagai berikut pemberdayaan masyarakat 43%, pembangunan desa 29%, pembinaan masyarakat 17%, dan penyelenggaraan pemerintah desa 11%. Dengan demikian, sektor yang dipilih sebagai prioritas utama untuk penggunaan dana desa Catur Karya adalah pemberdayaan masyarakat dengan persentase 43%, diikuti oleh pembangunan desa dengan 29%, pembinaan masyarakat desa dengan 17%, dan penyelenggaraan pemerintah desa dengan 11%.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa preferensi yang dipilih untuk dijadikan prioritas penggunaan adalah Pemberdayaan Masyarakat memiliki proporsi sebesar 43%, diikuti oleh Pembangunan Desa sebesar 29%, Pembinaan Masyarakat sebesar 17%, dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar 11%. Dengan demikian, hasil perhitungan AHP (*Analytical Hierarchy Process*) menunjukkan bahwa preferensi utama berdasarkan kuesioner adalah pemberdayaan masyarakat di Desa Catur Karya.

Oleh karena itu, pemerintah desa dapat memanfaatkan alokasi dana desa dari APBD untuk fokus pada pengembangan Desa Catur Karya. Menentukan prioritas penggunaan dana desa ini memungkinkan pemerintah daerah, terutama aparat desa, untuk menetapkan pengeluaran yang menjadi prioritas di Desa Catur Karya, sehingga dana tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjadi sumber pendapatan bagi desa. Dalam penelitian ini, prioritas desa pertama adalah pemberdayaan masyarakat, yang meliputi peningkatan fasilitas untuk menunjang pertanian dan perkebunan di Desa Catur Karya. Prioritas kedua adalah pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat, yang mencakup peningkatan kapasitas kader desa agar dapat mengelola desa dengan baik guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan Desa Catur Karya.

### Saran

Penelitian selanjutnya perlu menambahkan lebih banyak variabel atau kriteria di luar yang disebutkan dalam penelitian ini yang dapat dimasukkan dalam metode AHP, sehingga hasil penelitian mendatang dapat lebih luas dan komprehensif. Pemanfaatan dana desa bisa difokuskan pada potensi desa yang lebih diperlukan terlebih dahulu daripada melakukan pembangunan yang tidak prioritas. Misalnya, pembangunan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang tidak berjalan dengan baik.

## BIBLIOGRAPHY

- Dahyar Daraba, H. (2017). Pengaruh Program Dana Desa Terhadap Tingkat Partisipasi Masyarakat Di Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar. In *Maret* (Vol. 19, Issue 1). [www.djpk.depkeu.go.id/wp-content/](http://www.djpk.depkeu.go.id/wp-content/)

- Fitriani, M. N., & Saipudin, S. (2019). Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Anggaran Dana Desa Di Desa Tambak Bitin Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016-2017. *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 2(3), 566. <https://doi.org/10.20527/jiep.v2i3.1192>
- Mulyadi, E., & Sastraningsih, E. (2022). Analisis Pengelolaan Dana Desa Dan Dampaknya Terhadap Pembangunan Di Desa Labuhan Bilik Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan. In *Journal Of Economic Well Being (Joew)* (Vol. 1).
- Nofian, M. F. (2019). Analisis Dampak Penggunaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Ekonomi Pedesaan Di Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016. *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 1(2). <https://doi.org/10.20527/jiep.v1i2.1143>
- Putera, M. I. M., & Saleh, M. (2019). Efektifitas Penggunaan Dana Desa Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Sungai Batang Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar. *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 2(2), 547. <https://doi.org/10.20527/jiep.v2i2.1190>
- Republik Indonesia. (2014). Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Republik Indonesia. (2014). Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.
- Republik Indonesia. (2014). Peraturan Pemerintah No. 60 Tentang Dana Desa
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Jakarta.
- Rezkia, L. S., Program, A. Y., Pembangunan, S. E., Ekonomi, F., Bisnis, D., Lambung, U., & Banjarmasin, M. (2023). Pengaruh Dana Desa dan Pembangunan Infrastruktur Terhadap Indeks Desa Membangun di Kecamatan Barabai. *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 6(2), 858–871.
- Ripandi, A. (2019). Pengaruh IPM, Dana Desa Dan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di 13 Kabupaten/Kota Di Kalimantan Selatan. *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 1(1). <https://doi.org/10.20527/jiep.v1i1.1122>
- Rosalina, D. I., & Nuryadin, M. R. (2022). Dana Desa Dan Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten Banjar. *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 5(2), 756. <https://doi.org/10.20527/jiep.v5i2.7024>
- Saaty, T. L. (2008). Decision Making With The Analytic Hierarchy Process, Int. J.
- Sari, N., Program, S., Pembangunan, S. E., Ekonomi, F., Bisnis, D., Lambung, U., & Banjarmasin, M. (2023). Pengelolaan Prioritas Belanja Desa Pada Dana Desa Kota Raden Hulu Kabupaten Hulu Sungai Utara. *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 6(2), 1100–1108.
- Stia, A. A., Gazali, A., & Abstrak, B. (2019). Perencanaan Pembangunan Desa. In *Meraja Journal* (Vol. 2, Issue 2).
- Tri Kartono, D., & Hanif Nurcholis, Ms. (n.d.). Konsep dan Teori Pembangunan.
- Wijono, D., & Ekonomi, F. (2015). Penggunaan Metode Analytic Hierarchy Process Dalam Pengambilan Keputusan Penentuan Prioritas Program Kerja Dompot Dhuafa Yogyakarta Idham Ibtu 2) 1). In *Penggunaan Metode Analytic Hierarchy Proses dalam Pengambilan Keputusan ..... (Djoko Wijono, dkk.) Telaah Bisnis* (Vol. 16, Issue 1).
- Winey, A. R., & Siregar, S. (2019). Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kalimantan Selatan. *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 2(4), 915. <https://doi.org/10.20527/jiep.v2i4.1227>
- Wulansari, T. A. (2015). Peran Masyarakat Desa Landungsari Kabupaten Malang Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Rpjm-Des) Tahun 2013-2019. 4(3), 487.